



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa bahwa Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1391);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 150);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penerapan Alokasi Anggaran Kabupaten Berbasis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 19);

18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 114 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 114);
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah OPD yang melaksanakan tugas pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah OPD yang melaksanakan tugas urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
10. Camat adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

19. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari perkiraan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp20.478.745.680,00 (dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (3) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. DBH Pajak Daerah sebesar Rp16.555.755.800,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah); dan
 - b. DBH Retribusi Daerah sebesar Rp3.922.989.880,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan secara merata dan berkeadilan untuk setiap Desa berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula
- (5) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari anggaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (6) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari anggaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dari masing-masing Desa.

Pasal 3

(1) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

a. DBH Pajak Daerah

$$DBHPx = DBHPy + DBHPz$$

Keterangan :

DBHPx : DBH Pajak Daerah setiap Desa

DBHPy : Alokasi Dasar setiap Desa

DBHPz : Alokasi Formula setiap Desa

b. DBH Retribusi Daerah

$$DBHRx = DBHRy + DBHRz$$

Keterangan :

DBHRx : DBH Retribusi Daerah setiap Desa

DBHRy : Alokasi Dasar setiap Desa

DBHRz : Alokasi Formula setiap Desa

(2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar dengan jumlah Desa.

(3) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

a. DBH Pajak Daerah

$$DBHPz = Px + DBHP$$

Keterangan :

DBHPz : Alokasi Formula setiap Desa

Px : Rasio realisasi Pajak Daerah setiap Desa terhadap total realisasi Pajak Daerah Desa pada Kabupaten

DBHP : Pagu Alokasi Formula DBH Pajak Daerah

b. DBH Retribusi Daerah

$$DBHRMx = Rx + DBHP$$

Keterangan :

DBHRMx : DBH Retribusi Daerah Proporsional setiap Desa

Rx : rasio realisasi Retribusi Daerah setiap Desa terhadap total realisasi Retribusi Daerah Desa pada Kabupaten

DBHP : Pagu Alokasi Formula DBH Retribusi Daerah

- (4) Rasio realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas data realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah masing-masing Desa dari Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 4

- (1) Kertas kerja perhitungan rincian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyaluran Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan :
 - a. Triwulan I paling cepat bulan April sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa;
 - b. Triwulan II paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa;
 - c. Triwulan III paling cepat bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa; dan
 - d. Triwulan IV pada bulan Desember berdasarkan selisih antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Desa dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

- (4) Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berdasarkan data realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sampai dengan tanggal 10 Desember tahun berkenaan dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Rincian penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat mengenai Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024.
- (3) Evaluasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Camat pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Cq. PPKD dapat melakukan penundaan penyaluran DBH Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- (5) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan atas rekomendasi penundaan penyaluran yang disampaikan oleh Kepala DPMD.
- (6) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan terhadap penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) DPMD melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

- (3) BAPENDA melakukan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan kegiatan penunjang pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- (4) BKAD melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan penyaluran dana transfer kepada Desa.
- (5) Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 April 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2024
PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KERTAS KERJA PERHITUNGAN RINCIAN ALOKASI DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Kecamatan / Desa	BOBOT DESA	PAJAK DAERAH			RETRIBUSI DAERAH			KETERANGAN
			ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 x Pagu Alokasi Formula	6 = 4 + 5	7	8 = 3 x Pagu Alokasi Formula	9 = 7 + 8	10
1.	Kecamatan Arut Selatan								
	1 Pasir Panjang	0,0303	122.635.200,00	200.469.600,00	323.104.800,00	29.059.100,00	47.502.500,00	76.561.600,00	
	2 Kumpai Batu Atas	0,0072	122.635.200,00	47.524.000,00	170.159.200,00	29.059.100,00	11.261.100,00	40.320.200,00	
	3 Kumpai Batu Bawah	0,0062	122.635.200,00	40.922.900,00	163.558.100,00	29.059.100,00	9.696.900,00	38.756.000,00	
	4 Natai Raya	0,0130	122.635.200,00	86.012.900,00	208.648.100,00	29.059.100,00	20.381.300,00	49.440.400,00	
	5 Rangda	0,0358	122.635.200,00	237.046.600,00	359.681.800,00	29.059.100,00	56.169.700,00	85.228.800,00	
	6 Kenambui	0,0037	122.635.200,00	24.615.200,00	147.250.400,00	29.059.100,00	5.832.700,00	34.891.800,00	
	7 Umpang	0,0056	122.635.200,00	37.134.900,00	159.770.100,00	29.059.100,00	8.799.300,00	37.858.400,00	
	8 Tanjung Putri	0,0089	122.635.200,00	58.883.000,00	181.518.200,00	29.059.100,00	13.952.700,00	43.011.800,00	
	9 Runtu	0,0278	122.635.200,00	184.242.400,00	306.877.600,00	29.059.100,00	43.657.400,00	72.716.500,00	
	10 Medang Sari	0,0300	122.635.200,00	198.460.900,00	321.096.100,00	29.059.100,00	47.026.600,00	76.085.700,00	
	11 Natai Baru	0,0376	122.635.200,00	248.893.200,00	371.528.400,00	29.059.100,00	58.976.800,00	88.035.900,00	
	12 Tanjung Terantang	0,0157	122.635.200,00	103.757.800,00	226.393.000,00	29.059.100,00	24.586.100,00	53.645.200,00	
	13 Sulung	0,0053	122.635.200,00	34.809.700,00	157.444.900,00	29.059.100,00	8.248.400,00	37.307.500,00	
	Sub Total	0,2269	1.594.257.600,00	1.502.773.100,00	3.097.030.700,00	377.768.300,00	356.091.500,00	733.859.800,00	
2.	Kecamatan Kumai								
	1 Sungai Tendang	0,0318	122.635.200,00	210.654.200,00	333.289.400,00	29.059.100,00	49.915.800,00	78.974.900,00	
	2 Batu Belaman	0,0235	122.635.200,00	155.430.200,00	278.065.400,00	29.059.100,00	36.830.200,00	65.889.300,00	
	3 Sungai Kapitan	0,0220	122.635.200,00	145.545.700,00	268.180.900,00	29.059.100,00	34.488.000,00	63.547.100,00	
	4 Kubu	0,0149	122.635.200,00	98.405.000,00	221.040.200,00	29.059.100,00	23.317.700,00	52.376.800,00	
	5 Sungai Bakau	0,0068	122.635.200,00	45.055.600,00	167.690.800,00	29.059.100,00	10.676.200,00	39.735.300,00	
	6 Teluk Bogam	0,0225	122.635.200,00	148.783.200,00	271.418.400,00	29.059.100,00	35.255.100,00	64.314.200,00	
	7 Keraya	0,0076	122.635.200,00	50.020.600,00	172.655.800,00	29.059.100,00	11.852.700,00	40.911.800,00	
	8 Sabuai	0,0096	122.635.200,00	63.678.000,00	186.313.200,00	29.059.100,00	15.088.900,00	44.148.000,00	
	9 Teluk Pulai	0,0007	122.635.200,00	4.841.000,00	127.476.200,00	29.059.100,00	1.147.100,00	30.206.200,00	
	10 Sungai Cabang	0,0155	122.635.200,00	102.782.800,00	225.418.000,00	29.059.100,00	24.355.000,00	53.414.100,00	
	11 Sungai Sekonyer	0,0065	122.635.200,00	43.242.000,00	165.877.200,00	29.059.100,00	10.246.500,00	39.305.600,00	
	12 Sungai Bedaun	0,0188	122.635.200,00	124.566.800,00	247.202.000,00	29.059.100,00	29.516.900,00	58.576.000,00	

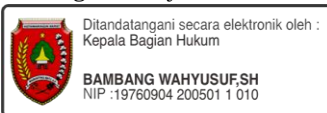
NO	Kecamatan / Desa	BOBOT DESA	PAJAK DAERAH			RETRIBUSI DAERAH			KETERANGAN
			ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 x Pagu Alokasi Formula	6 = 4 + 5	7	8 = 3 x Pagu Alokasi Formula	9 = 7 + 8	10
	13 Bumi Harjo	0,0193	122.635.200,00	127.963.600,00	250.598.800,00	29.059.100,00	30.321.800,00	59.380.900,00	
	14 Pangkalan Satu	0,0133	122.635.200,00	88.244.000,00	210.879.200,00	29.059.100,00	20.910.000,00	49.969.100,00	
	15 Sebuai Timur	0,0078	122.635.200,00	51.876.700,00	174.511.900,00	29.059.100,00	12.292.500,00	41.351.600,00	
	Sub Total	0,2206	1.839.528.000,00	1.461.089.400,00	3.300.617.400,00	435.886.500,00	346.214.400,00	782.100.900,00	
3.	Kec. Kotawaringin Lama								
	1 Lalang	0,0101	122.635.200,00	66.949.200,00	189.584.400,00	29.059.100,00	15.864.000,00	44.923.100,00	
	2 Rungun	0,0130	122.635.200,00	86.029.100,00	208.664.300,00	29.059.100,00	20.385.100,00	49.444.200,00	
	3 Kondang	0,0061	122.635.200,00	40.716.500,00	163.351.700,00	29.059.100,00	9.648.000,00	38.707.100,00	
	4 Riam Durian	0,0231	122.635.200,00	152.956.800,00	275.592.000,00	29.059.100,00	36.244.100,00	65.303.200,00	
	5 Dawak	0,0062	122.635.200,00	41.309.100,00	163.944.300,00	29.059.100,00	9.788.400,00	38.847.500,00	
	6 Sukajaya	0,0054	122.635.200,00	35.562.700,00	158.197.900,00	29.059.100,00	8.426.800,00	37.485.900,00	
	7 Kinjil	0,0038	122.635.200,00	25.053.800,00	147.689.000,00	29.059.100,00	5.936.700,00	34.995.800,00	
	8 Sakabulin	0,0059	122.635.200,00	38.770.000,00	161.405.200,00	29.059.100,00	9.186.800,00	38.245.900,00	
	9 Tempayung	0,0049	122.635.200,00	32.212.300,00	154.847.500,00	29.059.100,00	7.632.900,00	36.692.000,00	
	10 Baboal Baboti	0,0028	122.635.200,00	18.410.100,00	141.045.300,00	29.059.100,00	4.362.400,00	33.421.500,00	
	11 Sumber Mukti	0,0054	122.635.200,00	35.837.900,00	158.473.100,00	29.059.100,00	8.492.000,00	37.551.100,00	
	12 Suka Makmur	0,0045	122.635.200,00	30.017.600,00	152.652.800,00	29.059.100,00	7.112.900,00	36.172.000,00	
	13 Ipuh Bangun Jaya	0,0044	122.635.200,00	29.190.000,00	151.825.200,00	29.059.100,00	6.916.700,00	35.975.800,00	
	14 Palih Baru	0,0055	122.635.200,00	36.533.100,00	159.168.300,00	29.059.100,00	8.656.700,00	37.715.800,00	
	15 Sagu Suka Mulya	0,0040	122.635.200,00	26.747.000,00	149.382.200,00	29.059.100,00	6.337.900,00	35.397.000,00	
	Sub Total	0,1051	1.839.528.000,00	696.295.200,00	2.535.823.200,00	435.886.500,00	164.991.400,00	600.877.900,00	
4.	Kecamatan Arut Utara								
	1 Nanga Mua	0,0041	122.635.200,00	26.924.800,00	149.560.000,00	29.059.100,00	6.380.000,00	35.439.100,00	
	2 Sukرامي	0,0038	122.635.200,00	24.988.300,00	147.623.500,00	29.059.100,00	5.921.100,00	34.980.200,00	
	3 Gandis	0,0534	122.635.200,00	353.405.500,00	476.040.700,00	29.059.100,00	83.741.600,00	112.800.700,00	
	4 Kerabu	0,0038	122.635.200,00	24.988.300,00	147.623.500,00	29.059.100,00	5.921.100,00	34.980.200,00	
	5 Sambu	0,0029	122.635.200,00	19.506.700,00	142.141.900,00	29.059.100,00	4.622.200,00	33.681.300,00	
	6 Penyombaan	0,0753	122.635.200,00	498.824.800,00	621.460.000,00	29.059.100,00	118.199.600,00	147.258.700,00	
	7 Pandau	0,0036	122.635.200,00	23.547.800,00	146.183.000,00	29.059.100,00	5.579.800,00	34.638.900,00	
	8 Riam	0,0035	122.635.200,00	22.956.300,00	145.591.500,00	29.059.100,00	5.439.600,00	34.498.700,00	
	9 Panahan	0,0035	122.635.200,00	22.967.500,00	145.602.700,00	29.059.100,00	5.442.300,00	34.501.400,00	
	10 Sungai Dau	0,0000	122.635.200,00	2.400,00	122.637.600,00	29.059.100,00	7.080,00	29.066.180,00	
	Sub Total	0,1537	1.226.352.000,00	1.018.112.400,00	2.244.464.400,00	290.591.000,00	241.254.380,00	531.845.380,00	

NO	Kecamatan / Desa	BOBOT DESA	PAJAK DAERAH			RETRIBUSI DAERAH			KETERANGAN
			ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 x Pagu Alokasi Formula	6 = 4 + 5	7	8 = 3 x Pagu Alokasi Formula	9 = 7 + 8	10
5.	Kec. Pangkalan Lada								
	1 Pandu Sanjaya	0,0404	122.635.200,00	267.319.600,00	389.954.800,00	29.059.100,00	63.343.100,00	92.402.200,00	
	2 Pangkalan Tiga	0,0040	122.635.200,00	26.809.100,00	149.444.300,00	29.059.100,00	6.352.600,00	35.411.700,00	
	3 Lada Mandala Jaya	0,0045	122.635.200,00	29.809.200,00	152.444.400,00	29.059.100,00	7.063.500,00	36.122.600,00	
	4 Makarti Jaya	0,0047	122.635.200,00	31.396.900,00	154.032.100,00	29.059.100,00	7.439.700,00	36.498.800,00	
	5 Sumber Agung	0,0034	122.635.200,00	22.741.500,00	145.376.700,00	29.059.100,00	5.388.700,00	34.447.800,00	
	6 Purbasari	0,0054	122.635.200,00	35.930.500,00	158.565.700,00	29.059.100,00	8.513.900,00	37.573.000,00	
	7 Sungai Rangit Jaya	0,0060	122.635.200,00	39.738.800,00	162.374.000,00	29.059.100,00	9.416.400,00	38.475.500,00	
	8 Pangkalan Dewa	0,0037	122.635.200,00	24.759.100,00	147.394.300,00	29.059.100,00	5.866.800,00	34.925.900,00	
	9 Kadipi Atas	0,0171	122.635.200,00	113.046.000,00	235.681.200,00	29.059.100,00	26.787.000,00	55.846.100,00	
	10 Pangkalan Durin	0,0097	122.635.200,00	64.530.200,00	187.165.400,00	29.059.100,00	15.290.800,00	44.349.900,00	
	11 Sungai Melawen	0,0097	122.635.200,00	63.967.900,00	186.603.100,00	29.059.100,00	15.157.600,00	44.216.700,00	
	Sub Total	0,1087	1.348.987.200,00	720.048.800,00	2.069.036.000,00	319.650.100,00	170.620.100,00	490.270.200,00	
6.	Kec. Pangkalan Banteng								
	1 Pangkalan Banteng	0,0035	122.635.200,00	23.439.200,00	146.074.400,00	29.059.100,00	5.554.100,00	34.613.200,00	
	2 Karang Mulya	0,0138	122.635.200,00	91.261.500,00	213.896.700,00	29.059.100,00	21.625.000,00	50.684.100,00	
	3 Kebun Agung	0,0042	122.635.200,00	27.944.500,00	150.579.700,00	29.059.100,00	6.621.600,00	35.680.700,00	
	4 Sidomulyo	0,0139	122.635.200,00	92.146.700,00	214.781.900,00	29.059.100,00	21.834.700,00	50.893.800,00	
	5 Marga Mulya	0,0186	122.635.200,00	123.354.200,00	245.989.400,00	29.059.100,00	29.229.500,00	58.288.600,00	
	6 Amin Jaya	0,0054	122.635.200,00	35.935.100,00	158.570.300,00	29.059.100,00	8.515.000,00	37.574.100,00	
	7 Arga Mulya	0,0224	122.635.200,00	148.326.100,00	270.961.300,00	29.059.100,00	35.146.800,00	64.205.900,00	
	8 Mulya Jadi	0,0026	122.635.200,00	17.254.500,00	139.889.700,00	29.059.100,00	4.088.600,00	33.147.700,00	
	9 Natai Kerbau	0,0242	122.635.200,00	160.165.900,00	282.801.100,00	29.059.100,00	37.952.300,00	67.011.400,00	
	10 Simpang Berambai	0,0080	122.635.200,00	52.796.900,00	175.432.100,00	29.059.100,00	12.510.500,00	41.569.600,00	
	11 Sungai Hijau	0,0144	122.635.200,00	95.472.600,00	218.107.800,00	29.059.100,00	22.622.800,00	51.681.900,00	
	12 Sungai Bengkuang	0,0133	122.635.200,00	87.855.900,00	210.491.100,00	29.059.100,00	20.818.000,00	49.877.100,00	
	13 Sungai Kuning	0,0030	122.635.200,00	19.682.300,00	142.317.500,00	29.059.100,00	4.663.900,00	33.723.000,00	
	14 Sungai Pakit	0,0057	122.635.200,00	38.054.500,00	160.689.700,00	29.059.100,00	9.017.300,00	38.076.400,00	
	15 Sungai Pulau	0,0085	122.635.200,00	56.488.500,00	179.123.700,00	29.059.100,00	13.385.300,00	42.444.400,00	
	16 Karang Sari	0,0196	122.635.200,00	129.863.700,00	252.498.900,00	29.059.100,00	30.772.000,00	59.831.100,00	

NO	Kecamatan / Desa	BOBOT DESA	PAJAK DAERAH			RETRIBUSI DAERAH			KETERANGAN
			ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 x Pagu Alokasi Formula	6 = 4 + 5	7	8 = 3 x Pagu Alokasi Formula	9 = 7 + 8	10
	17 Berambai Makmur	0,0036	122.635.200,00	23.943.600,00	146.578.800,00	29.059.100,00	5.673.600,00	34.732.700,00	
	Sub Total	0,1848	2.084.798.400,00	1.223.985.700,00	3.308.784.100,00	494.004.700,00	290.031.000,00	784.035.700,00	
	TOTAL	1,00000	9.933.451.200,00	6.622.304.600,00	16.555.755.800,00	2.353.787.100,00	1.569.202.780,00	3.922.989.880,00	

URAIAN	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
PAGU	16.555.755.800,00	3.922.989.880,00	
Pagu Bagi Hasil Merata (PAGU x 60%)	9.933.453.480,00	2.353.793.928,00	Perbedaan dengan rincian perhitungan dikareanakan hasil pembulatan
Bagi Hasil Merata Per Desa (Bagi Hasil Merata/Jumlah Desa)	122.635.228,15	29.059.184,30	
Bagi Hasil Merata Per Desa Pembulatan	122.635.200,00	29.059.100,00	
Pagu Bagi Hasil Proporsional (PAGU x 40%)	6.622.302.320,00	1.569.195.952,00	Perbedaan dengan rincian perhitungan dikareanakan hasil pembulatan

Salinan sesuai dengan aslinya



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2024
PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN ALOKASI DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
62.01.01	KECAMATAN KUMAI				
62.01.01.2001	Sungai Cabang	225.418.000,00	53.414.100,00	278.832.100,00	
62.01.01.2002	Teluk Pulai	127.476.200,00	30.206.200,00	157.682.400,00	
62.01.01.2003	Sabuai	186.313.200,00	44.148.000,00	230.461.200,00	
62.01.01.2004	Keraya	172.655.800,00	40.911.800,00	213.567.600,00	
62.01.01.2005	Teluk Bogam	271.418.400,00	64.314.200,00	335.732.600,00	
62.01.01.2006	Sungai Bakau	167.690.800,00	39.735.300,00	207.426.100,00	
62.01.01.2007	Kubu	221.040.200,00	52.376.800,00	273.417.000,00	
62.01.01.2008	Sungai Kapitan	268.180.900,00	63.547.100,00	331.728.000,00	
62.01.01.2009	Batu Belaman	278.065.400,00	65.889.300,00	343.954.700,00	
62.01.01.2010	Sungai Tendang	333.289.400,00	78.974.900,00	412.264.300,00	
62.01.01.2014	Sungai Sekonyer	165.877.200,00	39.305.600,00	205.182.800,00	
62.01.01.2015	Sungai Bedaun	247.202.000,00	58.576.000,00	305.778.000,00	
62.01.01.2017	Bumi Harjo	250.598.800,00	59.380.900,00	309.979.700,00	
62.01.01.2032	Pangkalan Satu	210.879.200,00	49.969.100,00	260.848.300,00	
62.01.01.2034	Sabuai Timur	174.511.900,00	41.351.600,00	215.863.500,00	
	SUB TOTAL	3.300.617.400,00	782.100.900,00	4.082.718.300,00	
62.01.02	KECAMATAN ARUT SELATAN				
62.01.02.2001	Tanjung Putri	181.518.200,00	43.011.800,00	224.530.000,00	
62.01.02.2004	Pasir Panjang	323.104.800,00	76.561.600,00	399.666.400,00	
62.01.02.2010	Rangda	359.681.800,00	85.228.800,00	444.910.600,00	
62.01.02.2011	Kenambui	147.250.400,00	34.891.800,00	182.142.200,00	
62.01.02.2012	Runtu	306.877.600,00	72.716.500,00	379.594.100,00	
62.01.02.2013	Umpang	159.770.100,00	37.858.400,00	197.628.500,00	
62.01.02.2014	Kumpai Batu Bawah	163.558.100,00	38.756.000,00	202.314.100,00	
62.01.02.2015	Kumpai Batu Atas	170.159.200,00	40.320.200,00	210.479.400,00	
62.01.02.2016	Natai Raya	208.648.100,00	49.440.400,00	258.088.500,00	
62.01.02.2017	Medang Sari	321.096.100,00	76.085.700,00	397.181.800,00	
62.01.02.2018	Natai Baru	371.528.400,00	88.035.900,00	459.564.300,00	
62.01.02.2019	Tanjung Terantang	226.393.000,00	53.645.200,00	280.038.200,00	
62.01.02.2020	Sulung	157.444.900,00	37.307.500,00	194.752.400,00	
	SUB TOTAL	3.097.030.700,00	733.859.800,00	3.830.890.500,00	
62.01.03	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA				
62.01.03.2001	Babual Baboti	141.045.300,00	33.421.500,00	174.466.800,00	
62.01.03.2002	Tempayung	154.847.500,00	36.692.000,00	191.539.500,00	
62.01.03.2003	Sakabulin	161.405.200,00	38.245.900,00	199.651.100,00	
62.01.03.2004	Kinjil	147.689.000,00	34.995.800,00	182.684.800,00	
62.01.03.2005	Dawak	163.944.300,00	38.847.500,00	202.791.800,00	
62.01.03.2006	Riam Durian	275.592.000,00	65.303.200,00	340.895.200,00	
62.01.03.2009	Lalang	189.584.400,00	44.923.100,00	234.507.500,00	
62.01.03.2010	Rungun	208.664.300,00	49.444.200,00	258.108.500,00	
62.01.03.2011	Kondang	163.351.700,00	38.707.100,00	202.058.800,00	
62.01.03.2012	Suka Jaya	158.197.900,00	37.485.900,00	195.683.800,00	
62.01.03.2013	Sukamakmur	152.652.800,00	36.172.000,00	188.824.800,00	
62.01.03.2014	Sumber Mukti	158.473.100,00	37.551.100,00	196.024.200,00	
62.01.03.2015	Palih Baru	159.168.300,00	37.715.800,00	196.884.100,00	
62.01.03.2016	Ipuh Bangun Jaya	151.825.200,00	35.975.800,00	187.801.000,00	
62.01.03.2017	Sagu Suka Mulya	149.382.200,00	35.397.000,00	184.779.200,00	
	SUB TOTAL	2.535.823.200,00	600.877.900,00	3.136.701.100,00	
62.01.04	KECAMATAN ARUT UTARA				
62.01.04.2001	Nanga Mua	149.560.000,00	35.439.100,00	184.999.100,00	
62.01.04.2003	Sukarami	147.623.500,00	34.980.200,00	182.603.700,00	
62.01.04.2004	Gandis	476.040.700,00	112.800.700,00	588.841.400,00	
62.01.04.2005	Kerabu	147.623.500,00	34.980.200,00	182.603.700,00	
62.01.04.2006	Sambi	142.141.900,00	33.681.300,00	175.823.200,00	
62.01.04.2007	Penyombaan	621.460.000,00	147.258.700,00	768.718.700,00	
62.01.04.2008	Pandau	146.183.000,00	34.638.900,00	180.821.900,00	
62.01.04.2009	Riam	145.591.500,00	34.498.700,00	180.090.200,00	
62.01.04.2010	Panahan	145.602.700,00	34.501.400,00	180.104.100,00	
62.01.04.2011	Sungai Dau	122.637.600,00	29.066.180,00	151.703.780,00	
	SUB TOTAL	2.244.464.400,00	531.845.380,00	2.776.309.780,00	
62.01.05	KECAMATAN PANGKALAN LADA				
62.01.05.2001	Pangkalan Tiga	149.444.300,00	35.411.700,00	184.856.000,00	
62.01.05.2002	Pandu Sanjaya	389.954.800,00	92.402.200,00	482.357.000,00	
62.01.05.2003	Lada Mandala Jaya	152.444.400,00	36.122.600,00	188.567.000,00	
62.01.05.2004	Makarti Jaya	154.032.100,00	36.498.800,00	190.530.900,00	
62.01.05.2005	Sumber Agung	145.376.700,00	34.447.800,00	179.824.500,00	
62.01.05.2006	Purbasari	158.565.700,00	37.573.000,00	196.138.700,00	
62.01.05.2007	Sungai Rangit Jaya	162.374.000,00	38.475.500,00	200.849.500,00	
62.01.05.2008	Pangkalan Dewa	147.394.300,00	34.925.900,00	182.320.200,00	
62.01.05.2009	Kadipi Atas	235.681.200,00	55.846.100,00	291.527.300,00	
62.01.05.2010	Sungai Melawen	186.603.100,00	44.216.700,00	230.819.800,00	
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	187.165.400,00	44.349.900,00	231.515.300,00	
	SUB TOTAL	2.069.036.000,00	490.270.200,00	2.559.306.200,00	

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	DBH PAJAK DAERAH	DBH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
62.01.06	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG				
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	146.074.400,00	34.613.200,00	180.687.600,00	
62.01.06.2002	Mulya Jadi	139.889.700,00	33.147.700,00	173.037.400,00	
62.01.06.2003	Karang Mulya	213.896.700,00	50.684.100,00	264.580.800,00	
62.01.06.2004	Kebun Agung	150.579.700,00	35.680.700,00	186.260.400,00	
62.01.06.2005	Sidomulyo	214.781.900,00	50.893.800,00	265.675.700,00	
62.01.06.2006	Marga Mulya	245.989.400,00	58.288.600,00	304.278.000,00	
62.01.06.2007	Amin Jaya	158.570.300,00	37.574.100,00	196.144.400,00	
62.01.06.2008	Arga Mulya	270.961.300,00	64.205.900,00	335.167.200,00	
62.01.06.2009	Natai Kerbau	282.801.100,00	67.011.400,00	349.812.500,00	
62.01.06.2010	Simpang Berambai	175.432.100,00	41.569.600,00	217.001.700,00	
62.01.06.2011	Sungai Hijau	218.107.800,00	51.681.900,00	269.789.700,00	
62.01.06.2012	Sungai Pakit	160.689.700,00	38.076.400,00	198.766.100,00	
62.01.06.2013	Berambai Makmur	146.578.800,00	34.732.700,00	181.311.500,00	
62.01.06.2014	Karang Sari	252.498.900,00	59.831.100,00	312.330.000,00	
62.01.06.2015	Sungai Pulau	179.123.700,00	42.444.400,00	221.568.100,00	
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	210.491.100,00	49.877.100,00	260.368.200,00	
62.01.06.2017	Sungai Kuning	142.317.500,00	33.723.000,00	176.040.500,00	
	SUB TOTAL	3.308.784.100,00	784.035.700,00	4.092.819.800,00	
	TOTAL	16.555.755.800,00	3.922.989.880,00	20.478.745.680,00	

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

